

**EKSISTENSI RUANG PUBLIK DI BANYUWANGI STUDI KASUS FORUM MASYARAKAT TOLAK TAMBANG EMAS TUMPANG PITU “FORBANYUWANGI” DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN PESANGGARAN, KABUPATEN BANYUWANGI**

**Abdul Malik**

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[abdulmalik1@mhs.unesa.ac.id](mailto:abdulmalik1@mhs.unesa.ac.id)

**Awang Dharmawan**

Prodi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

[awangdharmawan@unesa.ac.id](mailto:awangdharmawan@unesa.ac.id)

**Abstrak**

ForBanyuwangi atau Forum Rakyat Banyuwangi merupakan kelompok masyarakat yang menolak adanya tambang emas di pegunungan Tumpang Pitu. Forum ini terdiri dari berbagai macam kalangan, diantaranya aktivis lingkungan, kalangan pelajar maupun mahasiswa, petani, nelayan bahkan seniman. ForBanyuwangi ini sebagai ruang publik yang merupakan portal berbagi informasi apa saja tentang kondisi Agraria dan Ekologi, portal ini dikelola secara partisipatif oleh siapa pun yang peduli dan ingin berbagi informasi yang ada di Banyuwangi, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan jurnalisme warga di Banyuwangi, ([forbanyuwangi.org](http://forbanyuwangi.org)). Melihat persoalan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi ruang publik ForBanyuwangi sebagai forum masyarakat yang menolak tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kritis. Sumber data yang diperoleh adalah hasil observasi dan wawancara mendalam. Selain itu, data yang diperoleh juga dari data resmi dari pihak ForBanyuwangi, buku, jurnal, makalah, artikel dan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ruang publik yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas. Teori ruang publik menjelaskan bahwa media untuk mengkomunikasikan informasi dan juga pandangan, dimana masyarakat bertemu, mengobrol serta berdiskusi tentang apa yang menjadi pokok pembicaraan.

**Kata Kunci :** ForBanyuwangi, Ruang Publik, Tambang Emas.

**Abstract**

*ForBanyuwangi or Banyuwangi People's Forum is a community group that rejects the existence of a gold mine in the Tumpang Pitu mountains. This forum consists of various groups, including environmental activists, students, farmers, fishermen and even artists. ForBanyuwangi as a public sphere which is a portal for sharing any information about Agrarian and Ecological conditions, this portal is managed in a participatory manner by anyone who cares and wants to share information in Banyuwangi, as well as part of the effort to realize citizen journalism in Banyuwangi, ([forbanyuwangi.org](http://forbanyuwangi.org)). Seeing this problem, the problem formulation in this study is how the existence of ForBanyuwangi public sphere as a community forum that rejects the Tumpang Pitu gold mine in Banyuwangi. This research was conducted through a qualitative approach with this type of critical research. Sources of data obtained are the results of observations and in-depth interviews. In addition, the data obtained are also from official data from ForBanyuwangi, books, journals, papers, articles and existing research results that are relevant to this research. The theory used in this research is the theory of public sphere put forward by Jurgen Habermas. Public sphere theory explains that the media is used to communicate information and views, where people meet, chat and discuss what is the subject of conversation.*

**Keyword :** ForBanyuwangi, Public Sphere, Gold Mine

## PENDAHULUAN

Jumlah konflik agraria selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2017 terdapat 659 konflik agraria dengan luasan 520.491,87 ha lahan dan melibatkan sebanyak 652.738 KK. Sedangkan catatan konflik dalam kurun waktu tahun 2015 - 2017, terjadi 1.361 letusan konflik agraria (kpa.or.id). Isu mengenai pertambangan merupakan hal yang sangat sensitif di kalangan masyarakat umumnya, mengingat besar kemungkinan dampak yang disebabkan oleh kegiatan tambang ialah kerusakan pada lingkungan, Salim (2007). Konflik kelompok masyarakat Banyuwangi yang menolak adanya aktivitas tambang emas ini, bermula dengan adanya izin kuasa pertambangan (KP) mengenai eksplorasi dan eksploitasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap PT. Bumi Suksesindo, sehingga mengakibatkan permasalahan terhadap masyarakat sekitar dengan adanya kegiatan tersebut. Dan tidak hanya itu saja, masyarakat juga geram dengan diterbitkannya surat putusan oleh Bupati Banyuwangi mengenai peralihan fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi, (Mongabay-Indonesia.com)

Dengan adanya surat pengesahan tersebut mengakibatkan reaksi keras dari berbagai kelompok yang berada di Banyuwangi, meliputi aliansi mahasiswa, kelompok petani, kelompok nelayan, LSM maupun aktivis lingkungan di Banyuwangi. Hal ini menjadi buntut aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut di Kantor Bupati Banyuwangi, guna mendesak pencabutan izin kegiatan pertambangan PT. Bumi Suksesindo di kawasan pegunungan Tumpang Pitu, (Mongabay-Indonesia.com). Belum adanya titik temu antara kelompok masyarakat, pihak korporasi maupun pemerintah yang mengakibatkan konflik ini masih berlanjut sampai sekarang. Sehingga memunculkan gerakan perlawanan terhadap korporasi tambang dalam wujud Forum Rakyat Banyuwangi "ForBanyuwangi".

ForBanyuwangi atau Forum Rakyat Banyuwangi ini merupakan kelompok masyarakat yang hingga saat ini menolak adanya tambang emas di pegunungan Tumpang Pitu. Forum ini terdiri dari berbagai macam kalangan, diantaranya aktivis lingkungan, kalangan pelajar maupun mahasiswa,

petani, nelayan bahkan seniman. ForBanyuwangi ini sebagai ruang publik yang merupakan portal berbagi segala informasi tentang kondisi Agraria dan Ekologi, portal ini dikelola secara partisipatif oleh orang-orang yang peduli dan ingin berbagi informasi yang ada di Banyuwangi, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan dan meningkatkan jurnalisme warga di Banyuwangi, (forbanyuwangi.org). Salah satu upaya tersebut kemudian melahirkan gagasan dari masyarakat untuk terus memperjuangkan haknya, baik itu bersifat konvensional maupun pemanfaatan media baru.

Eksistensi ForBanyuwangi juga terlihat dalam pemanfaatan media baru dalam bentuk perlawanannya, berupa akun-akun diberbagai media sosial. Terdapat website resmi [www.forbanyuwangi.org](http://www.forbanyuwangi.org), kemudian @forbanyuwangi di Twitter, Facebook maupun Instagram dengan menggunakan hastag #SaveTumpangPitu sebagai penandanya. Bentuk perlawanan lain juga kerap dilakukan oleh ForBanyuwangi, dengan adanya pembuatan kaos, lagu mars bahkan film dokumenter yang cukup signifikan dalam menggerakkan massa atau menggiring opini publik masyarakat, (forbanyuwangi.org).

Seiring perkembangan era konvergensi, dimana kesatuan media pada saat ini menjadi terstruktur sehingga media baru mengalami pertumbuhan. Dalam *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1989), Jurgen Habermas mengartikan public sphere atau ruang publik sebagai konsep kemerdekaan. Habermas menyampaikan bahwa di samping media massa, ruang publik dapat memiliki kegunaan untuk mewedahi berbagai pilihan alternatif terhadap masyarakat menyampaikan pemikiran dan pendapatnya, kemudian Habermas memaparkan jika ruang publik adalah media dalam proses penyampaian suatu informasi serta pandangan publik, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dalam menyikapi fenomena dan krisis sosial yang ada.

Ruang publik dinilai memiliki fungsi untuk mewedahi kegiatan masyarakat dalam berinteraksi. Berkaitan dengan hal ini, ruang publik didefinisikan dengan ruang dan juga tempat bagi warga negara untuk memaksimalkan pengembangan diri dalam kehidupan. Prinsip

ruang publik juga terlepas dari ketergantungan dalam mengurus oleh negara atau juga dari kekuatan lain yang bersifat koersif. Dalam pemanfaatan ruang publik, Carmona (2003) memaparkan bahwasanya terdapat keterlibatan yang pasif (*passive engagement*) dan juga aktif (*active engagement*). Keduanya tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya proses dalam interaksi tersebut, ketika masyarakat dalam menggunakan ruang publik bisa melaksanakan berbagai kegiatan yang termasuk dalam interaksi dengan berbagai cara yang beragam. Ruang yang difungsikan sebagai wadah selanjutnya harus dapat memberikan sebuah lingkungan yang kondusif sebagai bentuk memenuhi syarat dalam melaksanakan interaksi, yakni memberi kesempatan atau peluang dalam upaya terjadinya kontak dan juga komunikasi sosial.

Pada hakikatnya, wacana tentang ruang publik bukan menjadi sesuatu yang masih baru dalam kaitannya dengan hubungan negara terhadap rakyatnya. Dalam proses pembentukan opini publik bisa dilihat dari proses terbentuknya isu-isu, didefinisikan, dan kemudian dipublikasikan, hal tersebut memiliki arti bahwa bagian dari proses kontestasi diskursus dalam kegiatan debat publik, Van Dijk Teun. A (1997). Dalam proses ini ruang publik ditandai dengan terdapatnya wacana mengenai alternatif pilihan yang bisa untuk menyaingi wacana utama (*main discourse*), wacana tandingan (*counter discourse*) ini adalah sebuah kegiatan yang menunjukkan perlawanan kepada penguasa yang memiliki pertahanan kuat.

Pemberian makna terkait wacana yang timbul, baik itu wacana utama ataupun yang menjadi tandingan dapat dilakukan pendalaman dan analisis dengan berfokus sesuai dengan konteksnya yakni konteks sosial. Dalam kaitannya ini pemerintah Banyuwangi menilai bahwa adanya pertambangan emas yang dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo dapat memberikan sumbangsi dalam menunjang pembangunan daerah, (Kompas.com). Namun pada realitanya terbentuk opini publik bahwa pertambangan juga berdampak pada aspek sosial masyarakat, kerusakan lingkungan bahkan lapangan pekerjaan, yang dinilai berdampak negatif untuk kedepannya. (Mongabay-Indonesia.org)

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk melihat bagaimana strategi komunikasi dalam eksistensi ruang publik di Banyuwangi pada forum masyarakat tolak tambang emas Tumpang Pitu "ForBanyuwangi" desa Seumberagung, kecamatan Pesanggaran, kabupaten Banyuwangi. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu metode interview atau wawancara, observasi dan dokumen. Wawancara dilakukan kepada 3 narasumber yang terdiri dari kelompok petani, kelompok nelayan desa Sumberagung dan perwakilan divisi Advokasi ForBanyuwangi. Adapun metode analisis data menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil obsevasi lapangan mengenai ruang publik yang dihasilkan oleh ForBanyuwangi dalam studi kasus forum masyarakat tolak tambang emas Tumpang Pitu, peneliti meyakini dapat mendeskripsikan gambaran umum dan implementasi ruang publik. Penelitian ini tidak terlepas dari teori ruang publik oleh **Jurgen Habermas**, kemudian beliau mengenalkan gagasan ini melalui bukunya *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, dengan kata lain hal tersebut merupakan topik dalam pembahasan penelitian ini. Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya proses ruang publik diantaranya *kepentingan publik, kritis, strategi melawan dan model saluran*. Selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dengan teori tersebut.

### 1. Kepentingan Publik

Didalam teori ruang publik yang dipaparkan Jurgen Habermas menjelaskan bahwa kepentingan publik merupakan wadah aspirasi terhadap pokok pembahasan yang sama. Dalam hal ini masyarakat akan terbentuk konstruksi sosial secara kritis, dikarenakan adanya perdebatan atau bertukarnya pemikiran antar satu sama lain dalam konteks membangun kepentingan publik yang akan diangkat. Sedangkan kepentingan publik sendiri juga bermakna luas, bukan apa yang menjadi kepentingan publik. Yang dimaksud dalam hal tersebut adalah perhatian publik belum tentu kepentinganpubli, begitupun sebaliknya. Dan

kepentingan publik terkadang tidak menjadi perhatian publik, tetapi menjadi perhatian individu atau kelompok yang peduli pada kepentingan tersebut.

Dalam proses kepentingan publik, yakni pada permasalahan kasus tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Menghasilkan adanya kepentingan publik yang dirasakan mayoritas masyarakat petani dan nelayan yang terdampak adanya kegiatan pertambang emas tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, tepatnya pada Kecamatan Pesanggaran. Untuk tahun 2018 terdapat angka yang menunjukkan sumber pertanian yang cukup besar, meliputi 3.665 ton hasil dari perkebunan pepaya, 2.710 ton petai, 970 ton melon 192 ton durian dan 1.665 ton buah naga. (banyuwangikab.bps.go.id) Hal ini menunjukkan bahwa hasil pertanian merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan sumber ekonomi warga yang ada di Kecamatan Pesanggaran. Masyarakat menyangkan bahwasanya setiap tahun terjadi penurunan jumlah dari hasil pertanian, petani mengeluhkan minimnya sumber air dan rusaknya unsur tanah yang mengakibatkan tanaman menjadi mati dan masa produksi yang lama untuk berbuah. Sebagian petani menuturkan adanya kegiatan tambang yakni pengeboran sumber air di Gunung Tumpang Pitu guna penyulingan emas yang menjadikan tanah dan air menjadi kering, sehingga petani merasa rugi dan kebanyakan gulung tikar akibat adanya dampak pertambangan.

Untuk di sektor perikanan, menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, pada tahun 2016 menunjukkan 4864,78 ton dan pada tahun 2017 menunjukkan penurunan jumlah tangkapan menjadi 1990,00 ton. Dari data pendapatan di sektor perikanan tepatnya di perikanan laut, menunjukkan adanya penurunan dalam hasil tangkapan pertahunnya. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat nelayan sekitar perusahaan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, dimana masyarakat yang mayoritas nelayan merasa dirugikan dengan adanya kegiatan pertambangan tersebut. Masyarakat jelas dirugikan secara ekonomi dikarenakan mata pencahariannya terganggu dengan adanya tambang, dan hal ini

menjadi pembicaraan yang serius kemudian diperjuangkan oleh ForBanyuwangi. ForBanyuwangi menilai adanya keluhan kesah masyarakat sekitar tambang sehingga menyimpulkan dengan membawa isu ini sebagai kepentingan publik.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan ForBanyuwangi, yang kemudian menghasilkan beberapa maksud dan tujuan dari ForBanyuwangi dalam menginisiasi adanya kepentingan publik yang dihasilkan dari kegiatan tambang emas tersebut. ForBanyuwangi menilai kepentingan publik yang menjadi tolok ukur yakni dengan menambah wawasan masyarakat terhadap pentingnya menjaga ruang hidup, kemudian menumbuhkan rasa kecintaan terhadap ekosistem. Mengingat untuk saat ini di Indonesia bahkan diseluruh dunia sedang krisis terhadap lingkungan hidup. Maka dari itu pentingnya edukasi sejak dini yang dilakukan ForBanyuwangi terhadap pelajar bahkan masyarakat Banyuwangi, guna saling menjaga dan melestarikan lingkungan hidup guna tidak terjadi bencana bahkan kerusakan ekosistem di wilayah Banyuwangi.

Kepentingan publik terutama isu lingkungan dan ekosistem merupakan komponen utama dalam pergerakan masyarakat dalam kasus penolakan terhadap kasus tambang emas di Gunung Tumpang Pitu. Kemudian, adanya keluhan kesah masyarakat sekitar menganggap adanya tambang emas juga mengakibatkan berkurangnya ekonomi dan menjadi konflik sosial di dalam masyarakat. Maka dari itu isu-isu demikian dinilai cukup efektif, untuk penekanan terhadap kepentingan publik yang dihasilkan dari adanya kegiatan tambang emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

Kemudian adanya faktor yang berkaitan dengan ekonomi atau pendapatan menjadi hal yang sentral, dikarenakan hal ini menjadi tuntutan utama yakni keberlangsungan hidup masyarakat. Maka dari itu, adanya konstruksi masyarakat yang menjadikan suatu bentuk perlawanan dalam menuntut hak kehidupannya. Faktor lain dalam keberlangsungan hidup ialah faktor sosial dan kebudayaan, adanya pergeseran pola interaksi sosial dan kebudayaan jelas berbeda. Dimana terdapat pro-kontra di masyarakat yang diakibatkan adanya ketimpangan sosial, dimana

dari segi pendapatan maupun pekerjaan yang berbeda antara masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat. Dan apabila hal ini tetap berlanjut dapat menimbulkan budaya-budaya baru akibat banyaknya pendatang tepatnya pekerja pabrik di Desa Sumberagung.

## 2. Kritis

Ruang publik juga dikaitkan dengan ranah kritis, dalam hal ini publik atau masyarakat pada umumnya di ibaratkan sebagai arena, yang menyediakan wadah komunikasi dalam masyarakat. Kemudian guna mengawasi penguasa dalam menjalankan pemerintahannya diperlukan ruang publik sebagai aktor penting. Serta ruang publik sebagai alat penting dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi dari akar rumput menuju bawah. Dalam hal ini, terdapat beberapa penemuan dalam kaitan kritis yang terjadi di ruang publik yakni ForBanyuwangi dalam menginisiasi kasus adanya tambang dan segala penolakannya.

Menurut Ustman, selaku biro advokasi dari ForBanyuwangi ketika ditanya mengenai bagaimana proses pengawasan atau kritis dalam upaya penolakan ForBanyuwangi pada kasus tambang emas di Gunung Tumpang Pitu. Kritis sendiri memang marwah atau bentuk dari sebuah perlawanan, ForBanyuwangi juga melihat adanya ketimpangan sosial maupun lingkungan yang menjadi faktor utama kritis dari ForBanyuwangi.

Dari awal adanya tambang emas, terjadi banyak laporan-laporan baik dari warga sekitar maupun dari jurnalis atau media lokal. Namun realitasnya, hal-hal yang dimuat atau yang dirasakan masyarakat tersebut tidak digubris dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Lalu, langkah-langkah yang digunakan selanjutnya adalah ForBanyuwangi berani *showup* atau melakukan gerakan massif bersama masyarakat yang menolak adanya tambang. Dan hal ini menjadi komitmen ForBanyuwangi dalam memperjuangkan nilai kelompok terpinggirkan, seperti yang dirasakan sebagian masyarakat sekitar tambang emas tersebut. Adapun tanggapan masyarakat sekitar seperti masyarakat yang berprofesi petani maupun masyarakat yang berprofesi nelayan menganggap hal positif dengan adanya nilai kritis dari ForBanyuwangi.

Dari pendapat-pendapat warga yang menjadi imbas korporasi tambang, dirasa cukup menjadi bahan pertimbangan ForBanyuwangi dalam mengangkat isu dan nilai kritis dari kelompok terpinggirkan. Maka dari itu, ForBanyuwangi sendiri merupakan jembatan nilai perjuangan warga dalam menghadapi polemik dari kasus adanya tambang emas Gunung Tumpang Pitu. Menurut Utsman, ForBanyuwangi mempunyai tujuan utama sebagai nilai yang memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tertindas.

Nilai kritis dalam upaya memperjuangkan hak-hak kelompok terpinggirkan ini, menjadi landasan yang utama berkaitan dengan isu tentang penolakan terhadap adanya korporasi tambang. ForBanyuwangi juga berkomitmen dengan menjadi jembatan aspirasi dari masyarakat yang terdampak dari kegiatan tambang. Baik dari dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjadi isu atau nilai yang diangkat dari adanya perusahaan tambang emas di Kabupaten Banyuwangi.

## 3. Strategi Melawan

Habermas, dalam teori ruang publik membagi ruang publik menjadi dua berdasarkan konteks kekuasaan. Yang pertama yaitu ruang publik tumbuh dari dunia kehidupan tanpa kooptasi oleh kekuasaan. Yang kedua, ruang publik yang dikooptasi oleh kekuasaan. Kedua jenis tersebut erat kaitannya dengan aktor dalam ruang publik. Pribumi adalah aktor yang tidak dikooptasi, karena mereka berasal dari publik itu sendiri dan memiliki akar yang mendalam pada dunia kehidupan. Sementara aktor pemakai, yakni aktor-aktor yang tidak tumbuh dalam publik itu melainkan hadir didepan publik dan menduduki ruang publik dimana mereka memanfaatkan medium uang serta kuasa untuk memperalat publik mendominasi aktor di dalam ruang publik yang dikooptasi.

Merujuk pada kasus tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, kemudian adanya konflik masyarakat sekitar pertambangan membuat adanya penolakan dari elemen masyarakat meliputi warga, aktivis dan kelompok-kelompok masyarakat lain yang dirugikan adanya tambang. Lalu, ForBanyuwangi yang menginisiasi pergerakan masyarakat ini membuat melakukan beberapa strategi dalam melakukan penolakan. Adapun

strategi yang dilakukan ForBanyuwangi dalam hal ini ialah, dengan cara melakukan aksi, menggunakan media sosial sebagai alat penyebaran informasi, adanya *web* atau situs resmi dari ForBanyuwangi yang berisi kasus tambang emas dari kurun waktu ke waktu, serta adanya literasi sebagai upaya pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat bahkan pelajar di Banyuwangi akan dampak adanya tambang.

Aksi pertama yang dilakukan ForBanyuwangi yakni pada tahun 2008, tepatnya pada masa kepemimpinan Bupati Ratna Ani Lestari. Dalam aksi tersebut mendesak Bupati Banyuwangi untuk mencabut ijin usaha pertambangan (IUP) dari PT. Indo Muti Niaga (IMN) kala itu perusahaan tambang yang beroperasi di Gunung Tumpang Pitu. Dari aksi pertama masih belum ada titik temu dari kedua belah pihak, antara pemerintah daerah dengan peserta aksi. Hal tersebut belum meredakan semangat dari masyarakat dan kawan solidaritas yang peduli terhadap Gunung Tumpang Pitu, Utsman menjelaskan bahwa setiap hari Selasa Kliwon diadakan aksi solidaritas masyarakat dengan menyuarakan aspirasi dalam bentuk berdiri dengan membawa tulisan perlawanan terhadap korporasi tambang dan membentangkan spanduk kurang lebih 20 meter yang bertuliskan "Tutup Tambang Emas Tumpang Pitu".

Tidak hanya itu saja, bentuk strategi melawan dari ForBanyuwangi dan kawan-kawan solidaritas juga beragam. Diantaranya pada tanggal 27 Mei 2019, pada hari tersebut diperingati Hari Anti Tambang (HATAM) dan bertepatan dengan Refleksi 13 Tahun Semburan Lumpur Lapindo. Kegiatan ini juga dilakukan di berbagai Kota atau daerah terutama di Jawa Timur yang terdapat konflik dan ketidakadilan terhadap masyarakat. Sedangkan di Banyuwangi, bentuk aksi dalam memperingati Hari Anti Tambang (HATAM) diadakanlah kegiatan Temu Warga dalam bentuk kegiatan Istighotsah dan Refleksi.

Kegiatan ini juga mengadakan pertunjukan musik dan lomba mewarnai untuk anak-anak, dan ditutup pada malam hari dengan dilakukannya istighotsah oleh Gus Fayyadl dari Ponpes Nurul Jadid Probolinggo. Dari forum atau kegiatan ini diharapkan adanya edukasi atau pemahaman warga untuk tetap dan menjaga lingkungan agar lestari, serta merefleksikan dampak yang terjadi apabila

lingkungan dan ekosistem rusak akibat pertambangan. Contoh kecilnya yakni adanya semburan lumpur lapindo yang diakibatkan keserakahan korporasi, dan sampai saat ini masih belum berhenti. Edukasi-edukasi seperti ini lah diharapkan menjadi kepedulian masyarakat terutama dalam menjaga bumi dan isinya.

#### 4. Model Saluran

Didalam model saluran yang dijelaskan oleh Habermas pada penjelasannya yakni adanya kesamaan dalam meyuarkan isu publik, diantaranya terdapat saluran lintas identitas, profesi, dengan tujuan yang sama. Dalam hal ini, isu publik yang digiring tidak tumpang tindih dengan peran dan tujuan dari penggerak atau penginisiasi isu publik tersebut. Sehingga adanya kelompok-kelompok pendukung terciptanya model saluran dalam menyuarakan isu-isu tertentu yang berkaitan dengan isu publik yang sama. Dalam hal ini, isu publik yang terjadi di Banyuwangi yakni kasus konflik masyarakat terhadap korporasi tambang, kemudian masyarakat yang kontra tersebut membuat suatu forum atau kelompok yakni ForBanyuwangi. Tujuan didirikannya ForBanyuwangi yakni menyuarakan isu-isu publik dari dampak negatif yang dihasilkan oleh pertambangan, dan tergolong dari berbagai macam lintas identitas, profesi, namun satu tujuan yakni menyuarakan ketidakadilan terhadap adanya korporasi tambang.

Tidak hanya ForBanyuwangi saja yang memprakarsai kasus konflik yang terjadi di Gunung Tumpang Pitu, adapun kelompok-kelompok pendukung seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) yang hingga sampai ini membantu masyarakat yang menolak tambang dalam bidang hukum dan agraria pada kasus tersebut.

Adanya kesamaan dalam menggagas isu dari konflik tambang, setidaknya memberikan nilai positif terhadap masyarakat yang terkena dampak seputar tambang. Untuk itu, diperlukannya wadah atau saluran dalam memberikan perlindungan dan penjematan advokasi hukum terhadap masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi adanya kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak tambang. WALHI dan JATAM merupakan advokasi hukum di bidang lingkungan dan tambang, serta bersinergi dengan ForBanyuwangi dan diharapkan

mampu menyelesaikan kasus tambang yang terjadi di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

## PENUTUPAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penemuan di lapangan, penulis melihat dan menemukan bahwa tujuan dari ForBanyuwangi, warga masyarakat, ataupun LSM Nasional seperti WALHI dan JATAM adalah untuk menolak segala bentuk kegiatan pertambangan yang berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi atau lebih tepatnya di Gunung Tumpang Pitu dan sekitarnya. Kemudian, menuntut dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang tertindas oleh kepentingan korporasi tambang yang dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo (BSI), serta memberikan edukasi, motivasi dan penyadaran kepada warga bahwa mereka dapat bergerak menggunakan kemampuan mereka sendiri. Sebagai contoh nyata yakni aksi kolektif yang dilakukan warga dengan cara melakukan unjuk rasa, aksi selasa kliwon bahkan audiensi terhadap pemerintah dan perwakilan PT. Bumi Suksesindo (BSI) guna merumuskan berbagai strategi untuk mengembalikan Gunung Tumpang Pitu seperti sedia kala. Namun, beberapa dari aksi dan pertemuan tidak menemukan titik temu sehingga memunculkan gerakan-gerakan sosial yang kemudian masuk ke ranah isu publik di Kabupaten Banyuwangi.

Pernyataan Schuler & Day (2004) mengenai nilai kritis yang dibawa oleh isu publik terhadap ruang publik secara garis besar dibagi menjadi tiga, yang pertama ruang sebagai arena. Makna tersebut mengindikasikan bahwa ruang publik menyediakan basis komunikasi antar masyarakat. Kedua, ruang publik itu adalah publik itu sendiri. Makna tersebut mengindikasikan bahwa publik adalah aktor penting dalam menjalankan demokrasi dari tingkatan akar rumput. Ketiga, ruang publik adalah agen. Maksudnya ruang publik itu merupakan agen atau alat penting dalam menyampaikan aspirasi dari akar rumput menuju bawah. Kemudian, Hebermas menjelaskan bahwa adanya kemunduran dari ruang publik terhadap isu publik yang sedang digiring. Dalam hal ini Habermas menafsirkan adanya keprihatinan privasi

individu dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga, yang dihadapkan dengan adanya tuntutan dan keprihatinan sosial dan publik. Adapun hal ini mencakup fungsi menengahi kontradiksi antara kaum borjuis dan kaum non borjuis, guna mengatasi kepentingan pribadi terhadap kepentingan bersama, sehingga mencapai konsensus yang bersifat sosial.

Terlepas dari itu semua pasti ada beberapa alasan lain dan bersifat pribadi, sehingga melatarbelakangi pilihan ForBanyuwangi bersama warga masyarakat khususnya di Desa Sumberagung yang sampai saat ini masih konsisten menyuarakan hak dan aspirasinya dengan melakukan gerakan sosial menolak Tambang Emas Tumpang Pitu yang dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo (BSI). Kemudian, faktor lingkungan, sosial dan ekonomi juga memberikan dampak nyata yang hingga saat ini dirasakan warga sekitar pertambangan. Segala penunjang kebutuhan dan mata pencaharian warga didapatkan dari hasil bumi sekitar Gunung Tumpang Pitu.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah di uraikan diatas, peneliti akan memberi saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama saran secara akademis adalah kritik yang ditujukan kepada penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan dalam isi penelitian skripsi ini. Dan yang kedua yakni saran di lapangan, penulis tujukan untuk beberapa subjek seperti berikut:

- **ForBanyuwangi**

Saran diberikan kepada ForBanyuwangi agar sesegera mungkin menyebarluaskan liputan-liputan terhadap dampak adanya tambang ke sumber media konvensional, kemudian ajukan banding terhadap badan hukum dikarenakan adanya cacat hukum dalam Surat Keputusan (SK) terhadap pengelolaan tambang. Tetap konsisten terhadap upaya perlindungan dari tokoh-tokoh warga yang sampai saat ini terjerat kasus kriminalisasi. Adanya edukasi-edukasi dilakukan terhadap mahasiswa ataupun pelajar di Banyuwangi, guna menambah wawasan bahwa kasus pertambangan di Banyuwangi sedang tidak baik-baik saja.

- **Warga Desa Sumberagung**

Saran juga sekaligus diberikan kepada warga yang tergabung dalam basis dukungan untuk menolak kegiatan tambang di Gunung Tumpang Pitu, diharapkan warga tetap berkomitmen dan menambah rasa solidaritas atas adanya kegiatan tambang. Kemudian, jangan sampai terprovokasi oleh oknum-oknum yang dapat merugikan warga masyarakat sekitar Gunung Tumpang Pitu.

- **Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi**

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, tolong jangan tutup mata, tutup telinga. Lihat dan lakukan peninjauan kembali warga masyarakat Desa Sumberagung yang sampai saat ini memperjuangkan hak dalam kehidupannya. Warga masyarakat menginginkan kelangsungan hidup yang lebih baik, untuk itu dikaji kembali dampak ekonomi, sosial dan lingkungan di sekitar kawasan pertambangan apalagi dekat terhadap pemukiman warga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Teun, Van Dijk. (1997). *Discourse As Structure and Process (Discourses Studies: A Multidisciplinary Introduction)*. London: Sage Ltd.
- A. Zuhro, Zuhana., & Hakim, RZ. (2016). *Fokus Liputan: Tambang Emas Tumpang Pitu dari Masa ke Masa*. (<https://mongabay-indonesia.com>) diakses pada tanggal 04 Oktober 2018
- Almond, Gabriel A. (1960). *The Politics of the Developing Areas*. Princeton: Princeton University Press
- Arbi, Sanit. (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta. Penerbit: CV Rajawali
- Carmona. (2003). *"Public Space Urban Space" The Dimention of Urban Design*. London: Architectural Press London
- Coombs, W. T. dan Holladay, S.J. (2010). *The Handbook of Crisis Communication*. Malden. MA: Wiley-Blackwell
- Duverger, Maurice. (1998). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS
- Estebert, Kristin G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. New York: Mc Graw Hill
- Faizal, Achmad. (2018). *Tahun ini, Tumpang Pitu Banyuwangi targetkan produksi emas 4,8 ton*. (<https://regional.kompas.com>) diakses pada tanggal 10 Oktober 2018
- Grunig, L. A. (1992). *"Activism: How it limits the effectiveness of organizations and how excellent public relations departments respond"*. Hillsdale. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Jati, Wasiso Raharjo. (2016). *Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indoneia*. (<https://ejournal.ugm.ac.id>) diakses pada tanggal 15 Oktober 2018
- Konsorium Pembaruan Agraria (KPA). (2017). *KPA Launching Catatan Akhir Tahun 2017*. (<https://www.kpa.or.id>) diakses pada tanggal 04 Oktober 2018
- Habermas, Jurgen. (1991). *The Structural Transformation of The Public Sphere*. diterjemahkan oleh Thomas Burger. The MIT press: Massachusett
- Horison, Lisa. (2007). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Pernada Group
- Moleong, L. J. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasution. (1998). *Metodologi Penelitian Naturalistik*. Bandung: PN. TARSIT
- Nasution, Robby Darwis. (2017). *Kyai Sebagai Agen Perubahan Sosial Dan Perdamaian Pada Masyarakat Tradisional*. (<https://jurnal.unpad.ac.id>) diakses pada tanggal 15 Oktober 2018
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta.

Prabowo, Hendro, dkk. (2004). *Ruang Publik: Studi Lintas Budaya Berbasiskan Teknologi Informasi*.

(<https://repository.gunadarma.ac.id>) diakses pada tanggal 13 Oktober 2018

Rahardjo, Mudjia. (2017). *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. (<https://repository.uin-malang.ac.id>) diakses pada

tanggal 20 Oktober 2018

Sanit, Arbi. (1981). *Sistim Politik Indonesia*, Jakarta, Penerbit: CV Rajawali, hal.107-110

Salim, H.S. (2007). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Setiawan, Asep. (1998). *Dalam Diktat Gerakan Sosial*, Jakarta: Jurusan Ilmu Politik, FISIP UMJ, hal.10

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Yin, Robert K. (2011). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

